

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Rabu, 4 Desember 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Rabu, 4 Desember 2019	Sejumlah Tol Baru Beroperasi Fungsional	Sejumlah ruas jalan tol dipastikan mulai beroperasi pada masa Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Ruas tol tersebut dipastikan dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma sebelum Peraturan Presiden terkait tarif tol dirilis.
2	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Rabu, 4 Desember 2019	Ibukota Negara: Desain Tata Kota Harus Komprehensif	Desain ibu kota negara (IKN) harus komprehensif dan mengejawantahkan konsep Smart Metropolis atau bukan sekadar pemindahan kantor pemerintahan atau pembangunan fisik infrastruktur semata.
3	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)	Rabu, 4 Desember 2019	Berita Foto	Uji coba aspal plastik oleh Pemkot Tegal, Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) dan Asosiasi Daur Uang Plastik Indonesia (Adupi) Jawa Tengah sepanjang 1.800 meter dengan 5% campuran aspal tersebut untuk mengurangi sampah plastik yang merusak lingkungan dan penghematan serta ketahanan aspal untuk infrastruktur jalan.
4	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)	Rabu, 4 Desember 2019	PENATAAN KOTA BALIKPAPAN: Ada 4,75 Ha Kawasan Kumuh	Masih ada kawasan ku muh seluas 4,75 hektare dari total 58,58 hektare kawasan kumuh di Kota Balikpapan hingga akhir tahun ini.
5	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)	Rabu, 4 Desember 2019	JELAJAH INFRASTRUKTUR SUMATRA III: Harapan Baru di Tanah Melayu	Jalan tol Pekanbaru—Dumai bakal terbentang sepanjang 131 kilometer. Jarak itu pendek bila dibandingkan dengan jalan nasional yang mencapai 186 kilometer.
6	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)	Rabu, 4 Desember 2019	Pembebasan Lahan Jadi Kunci HK Selesaikan JTTS	PT Hutama Karya (Persero) patut berbangga karena mampu menyelesaikan pembangunan sejumlah ruas Jalan Tol Trans–Sumatra sesuai dengan tenggat yang diberikan pemerintah.
7	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)	Rabu, 4 Desember 2019	RUMAH SEDERHANA JAKARTA: Lahan BUMD Bisa Jadi Solusi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuntaskan program bedah rumah untuk 4.411 rumah tidak layak huni (RLTH) di Provinsi Banten, melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
8	Media Indonesia (Halaman, 13)	Rabu, 4 Desember 2019	Kementan-PU Pera Kolaborasi Infrastruktur	Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sepakat melaksanakan sinergi pengembangan infrastruktur pertanian.

Judul	Sejumlah Tol Baru Beroperasi Fungsional	Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Sejumlah ruas jalan tol dipastikan mulai beroperasi pada masa Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Ruas tol tersebut dipastikan dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma sebelum Peraturan Presiden terkait tarif tol dirilis.		

► LIBUR NATAL & TAHUN BARU

Sejumlah Tol Baru Beroperasi Fungsional

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah ruas jalan tol dipastikan mulai beroperasi pada masa Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Ruas tol tersebut dipastikan dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma sebelum Peraturan Presiden terkait tarif tol dirilis.



Aprianus Dini T
redaksi@bisnis.com

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut total panjang ruas tol yang masih gratis selama Nataru adalah 134,5 kilometer yang di antaranya menjadi bagian dari Trans Sumatra.

Adapun ruas tol di Trans Sumatra mulai difungsikan tersebut adalah Ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung sepanjang 33 kilometer, dan Ruas tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 9,5

► Jalan tol Trans Jawa yang berfungsi menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 sepanjang 1.002 kilometer, termasuk Tol Layang Japek II.

kilometer. Kemudian di Kalimantan, ruas Tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 66 kilometer, dan ruas Tol Manado-Bitung sepanjang 26 kilometer di Sulawesi.

Selain itu, tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) II sepanjang sekitar 36 kilometer dan ruas tol Kunciran-Serpong sejauh 11 kilometer sudah berfungsi tetapi belum dikenakan tarif.

Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal membenarkan bahwa ruas Tol Layang Japek II sudah dapat dimanfaatkan masyarakat pada Nataru ini.

"Kalau targetnya memang Nataru sudah dapat difungsikan. Kalau tarif memang masih menunggu keputusan [Perpres terkait tarif] kemudian sosialisasi dan seterusnya," ujarnya kepada *Bisnis*, di Jakarta, Selasa

(3/12).

Menteri Basuki pun memastikan bahwa ruas tol layang Japek II tersebut hanya boleh dilalui oleh kendaraan golongan I atau mobil pribadi. "Kita atur nanti cuma golongan I saja yang naik, truk tetap di bawah," ujarnya.

Dengan keberadaan ruas tol layang sepanjang 36,4 kilometer, yang membentang dari Cikunir hingga Karawang Barat, diharapkan kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi di ruas eksisting bisa berkurang hingga 50%.

SIAP OPERASI

Dalam pernyataan resminya, Basuki mengatakan bahwa jalan tol Trans Jawa yang berfungsi menjelang perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 sepanjang 1.002 kilometer, termasuk Tol Layang Japek II.

Kemudian di Pulau Sumatra ruas

tol yang bisa dimanfaatkan adalah sepanjang 511,5 km yang terbagi dalam 469 kilometer jalan operasional dan sisanya sepanjang 42,5 kilometer merupakan jalan tol fungsional.

Lalu, di luar Pulau Jawa dan Sumatra, Kementerian PUPR juga telah menyiapkan Jalan Tol fungsional sepanjang 92 kilometer yakni pada ruas Balikpapan—Samarinda (Seksi 2—4 Samboja—Samarinda) di Kaltim sepanjang 66 km dan Manado—Bitung (Seksi 1—2A Airmadidi—Danowudu) di Sulut sepanjang 26 kilometer.

Selain itu, Kementerian PUPR pun akan menyediakan 26 toilet cabin, 13 unit bus toilet VIP, 13 unit mobil tinja, 63 unit mobil tangki air, dan 449 hidran umum di lokasi rest area di jalan tol dan disebarkan juga di ruas-ruas jalan nasional.

Di ruas jalan tol, akan disediakan

mobile reader, mobile top up, dan penjualan kartu perdana uang elektronik pada GT dengan kepadatan lalu lintas tinggi.

"Untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti longsor akibat peralihan musim, kami siagakan tim tanggap bencana pada titik-titik rawan bencana," ujarnya.

Menteri Basuki juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas, Badan Meteorologi, Klimatologi, & Geofisika (BMKG), dan pihak terkait lainnya untuk menjaga kelancaran dan kenyamanan selama Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

"Untuk koordinasi, Posko Siaga Sapta Taruna Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 tersebar di jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia," ujarnya. □

Judul	Ibukota Negara: Desain Tata Kota Harus Komprehensif	Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Desain ibu kota negara (IKN) harus komprehensif dan mengejawantahkan konsep Smart Metropolis atau bukan sekadar pemindahan kantor pemerintahan atau pembangunan fisik infrastruktur semata.		

► IBU KOTA NEGARA

Desain Tata Kota Harus Komprehensif

Bisnis, JAKARTA — Desain ibu kota negara (IKN) harus komprehensif dan mengejawantahkan konsep *Smart Metropolis* atau bukan sekadar pemindahan kantor pemerintahan atau pembangunan fisik infrastruktur semata.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Jakarta Nirwono Joga mengatakan bahwa sejak awal rencana desain tata kota IKN harus komprehensif. Konsep *smart green sustainable metropolis*, katanya, harusnya diterapkan sejak awal mulai konsep gagasan, proses dan sistem perencanaan, pelaksanaan pembangunan infrastruktur kota, pemeliharaan, hingga pengelolaan kota.

"Jadi bukan sekadar berujung pada wujud fisik kotanya saja," ujarnya melalui pesan singkat kepada *Bisnis*, Senin (2/12).

Dia mengatakan demikian menanggapi upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menyelenggarakan sayembara guna mendapat gagasan desain kawasan IKN. Sayembara itu diikuti oleh 755 peserta yang mendaftar dan Kementerian PUPR

mengumumkan bahwa 292 peserta sudah melakukan tahap pemasukan karya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa melalui sayembara tersebut, diharapkan ada banyak masukan atau ide desain kawasan melalui partisipasi masyarakat, yang ahli di banyak bidang seperti arsitektur, perencanaan, dan perancangan kota.

"Perencanaan dan perancangan IKN ini merupakan langkah awal yang menentukan dalam mewujudkan IKN yang sesuai dengan harapan kita semua," katanya.

Konsep dari para pemenang sayembara tingkat nasional akan menjadi bagian dari kerangka acuan untuk Sayembara taraf internasional pada 1 Januari-31 Maret 2020.

Basuki mengatakan bahwa pengusaha Jepang berminat untuk ikut terlibat dalam proyek Ibu Kota Negara baru di Indonesia karena memiliki pengalaman membangun kota baru yakni Tsukuba.

Pengusaha Jepang itu diketahui berminat menjadi pemasok gas di Ibu Kota-Negara baru melalui Tokyo Gas. (Aprianus Dani T)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 7)		
Resume	Uji coba aspal plastik oleh Pemkot Tegal, Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) dan Asosiasi Daur Uang Plastik Indonesia (Adupi) Jawa Tengah sepanjang 1.800 meter dengan 5% campuran aspal tersebut untuk mengurangi sampah plastik yang merusak lingkungan dan penghematan serta ketahanan aspal untuk infrastruktur jalan.		

► UJI COBA ASPAL PLASTIK



Antara/Okky Lukmanasyah

Sejumlah pekerja melakukan pengaspalan saat uji coba aspal dari bahan baku plastik di Komplek Pemerintahan Kota Tegal, Jawa Tengah, Selasa (3/12). Uji coba aspal plastik oleh Pemkot Tegal, Industri Aromatik Olefin dan Plastik (Inaplas) dan Asosiasi Daur Uang Plastik Indonesia (Adupi) Jawa Tengah sepanjang 1.800 meter dengan 5% campuran aspal tersebut untuk mengurangi sampah plastik yang merusak lingkungan dan penghematan serta ketahanan aspal untuk infrastruktur jalan.

Judul	PENATAAN KOTA BALIKPAPAN: Ada 4,75 Ha Kawasan Kumuh	Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 9)		
Resume	Masih ada kawasan kumuh seluas 4,75 hektare dari total 58,58 hektare kawasan kumuh di Kota Balikpapan hingga akhir tahun ini.		

► PENATAAN KOTA BALIKPAPAN

Ada 4,75 Ha Kawasan Kumuh

Bisnis, BALIKPAPAN — Masih ada kawasan kumuh seluas 4,75 hektare dari total 58,58 hektare kawasan kumuh di Kota Balikpapan hingga akhir tahun ini.

Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Balikpapan Ketut Astana menjelaskan bahwa sepanjang Januari-November tahun ini, Balikpapan bisa mengentaskan 53,25 hektare kawasan kumuh. Menurutnya, luas kawasan yang ditangani cenderung mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Membandingkan dengan tahun lalu, misalnya ada seluas 166,28 hektare kawasan kumuh yang dientaskan. “Kawasan kumuh yang ditangani berada di 12 kelurahan, yaitu Kelurahan Muara Rapak, Baru Ulu, Baru Tengah, Margo Mulyo, Sepinggan, Sepinggan Raya, Karang Jati, Klandasan, Damai, Telagasari, Manggar dan Manggar Baru,” jelasnya, Selasa (3/12).

Sejauh ini, penanganan permukiman kumuh dilakukan secara bertahap melalui anggaran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan CSR (*corporate social responsibility*). (Anitana W. Puspa)

Judul	JELAJAH INFRASTRUKTUR SUMATRA III: Harapan Baru di Tanah Melayu	Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	Jalan tol Pekanbaru—Dumai bakal terbentang sepanjang 131 kilometer. Jarak itu pendek bila dibandingkan dengan jalan nasional yang mencapai 186 kilometer.		

► JELAJAH INFRASTRUKTUR SUMATRA III

Harapan Baru di Tanah Melayu

Langit mulai mendung saat Alvino menginjak pedal rem di bilangan Minas, Kabupaten Siak, Riau, pekan lalu. Mobil yang dikemudikan langsung berhenti, mengikuti deretan kendaraan lain yang juga terhenti.

Rivki Maulana & Arif Gunawan
redaksi@bisnis.com

Sampai 17 menit kemudian, mobil melaju perlahan dan selama itu dia tak tahu apa yang menjadi biang keladi kemacetan. Akhirnya dia mahfum, sebuah truk pengangkut minyak sawit yang teronggok di pinggir jalan menjadi musabab kemacetan, fenomena yang belakangan sering dialami saat melintasi jalan antara Pekanbaru dan Dumai. "Sekarang jadi sering macet,"

terungkap Alvino yang sudah 10 tahun menjadi pengemudi di Riau. Alvino mendampingi Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra selama 5 hari, mulai dari Jumat (22/11) hingga Selasa (26/11).

Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra 2019 yang kali ini disponsori oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT

Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk.

Kegiatan ini merupakan bagian ketiga dari program Jelajah Infrastruktur yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Bila ada daftar ketidakpastian, jalan nasional di lintasan Pekanbaru—Minas—Kandis—Duri masuk ke dalam senarai. Tim Jelajah Infrastruktur Sumatra yang melalui jalan tersebut sempat terjebak kemacetan



PT PLN (PERSERO)

Taufiq menuturkan, konektivitas yang lebih cepat bakal menopang arus barang

dan manusia di wilayah Riau. Jalan tol, lanjut Taufiq juga bakal membuka potensi ekonomi di setiap kabupaten di Riau.

"Contohnya Kabupaten Kampar, produksi ikannya 12 ton per hari. Ini bisa diekspor ke Malaysia, Singapura. Dikirim ke Dumai [untuk diekspor] lewat jalan

baru—Dumai.

Kepala Dinas Perhubungan Riau M. Taufiq mengatakan bahwa jalan Tol Pekanbaru—Dumai akan menambah kapasitas jalan sehingga turut meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Jalan tol Pekanbaru—Dumai bakal terbentang sepanjang 131 kilometer. Jarak itu pendek bila dibandingkan dengan jalan nasional yang mencapai 186 kilometer.

Jarak yang mencuri ditambah dengan spesifikasi jalan bebas hambatan membuat waktu tempuh menuju Dumai dari Pekanbaru turut terpankas. Dengan kecepatan 60 kilometer per jam, jarak sejauh 131 kilometer bisa ditempuh dalam waktu 2 jam. Durasi ini pendek bila dibandingkan dengan melalui jalan nasional selama 4—5 jam.



tol," ujarnya.

Namun, kondisi jalan di Riau kurang mengembirakan. Data Kementerian PUPR menunjukkan pada 2018, jalan nasional di Riau yang tidak mantap mencapai 196,84 kilometer atau 14,73% dari total panjang jalan nasional di provinsi tersebut.

Nisbah jalan tidak mantap lebih besar pada jalan provinsi hingga kabupaten/kota (lihat tabel).

Kondisi jalan yang buruk membuat konektivitas tersendat. Padahal, sumber daya alam di Riau amat melimpah. Selain migas yang sudah dimanfaatkan sejak 90 tahun lalu, Riau juga menjadi penghasil minyak sawit terbesar di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, pada 2018 luas area perkebunan sawit di Riau mencapai 2,32 juta hektare. Adapun produksi kelapa sawit dari luas area tersebut mencapai 7,14 juta ton. Dengan kata lain, produktivitas per hektare mencapai 3,07 ton.

Jalan baru memang harus ada karena konektivitas menjadi isu krusial bagi perkembangan perekonomian Riau, provinsi dengan produk domestik regional bruto terbesar di Sumatra. Problem yang dihadapi Riau secara umum sama dengan masalah yang mendera Sumatra; terlalu mengandalkan komoditas.

Dalam 5 tahun terakhir, perekonomian Riau tidak pernah tumbuh lebih dari 5% dan selalu di bawah rata-rata pertumbuhan nasi-

onal, bahkan pertumbuhan spasial di Sumatra. Hingga kuartal III/2019, pertumbuhan ekonomi Riau tumbuh 2,74%. Namun, bila mengeluarkan kontribusi sektor minyak dan gas, ekonomi Riau tumbuh 5,2%.

Industri menjadi sektor yang bisa menjadi andalan Riau untuk lepas dari jerat ketegantungan terhadap komoditas. Selama ini, sumber daya alam memang menjadi tumpuan. Membangun industri hilir membutuhkan konektivitas yang mantap.

Oleh karena itu, pembangunan jalan Tol Pekanbaru—Dumai bakal menopang rencana yang lebih besar, penghiliran industri. Sejauh ini, progres jalan tol Pekanbaru—Dumai sudah mencapai lebih dari 77%.

Muhammad Fauzan, Corporate Secretary PT Hutama Karya, mengatakan sebagian kecil jalan tol Pekanbaru—Dumai bisa digunakan pada akhir 2019. Fauzan menyebut pihaknya siap membuka jalan tol 12,5 kilometer ini di seksi 1 dan seksi 2.

Dia menerangkan, kepastian pembukaan sebagian kecil jalan tol Pekanbaru—Dumai itu akan tergantung hasil uji laik fungsi yang akan digelar setelah konstruksi rampung.

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), panjang seksi 1 (Pekanbaru—Minas) mencapai 9,5 km sedangkan seksi 2 (Minas—Petapahan) 24,1 km. "Seksi 1 akan bisa dibuka dulu kemudian seksi 5 dan 6 bisa cepat selesai. Secara keseluruhan, kami menargetkan [selesai] pada Maret 2020," ujarnya.

Fauzan menyebut, posisi Riau terbilang istimewa karena terletak di tengah Pulau Sumatra. Riau juga menjadi Provinsi yang akan dilintasi jalan tol Trans-Sumatra dari empat arah

sehingga menjadi simpul konektivitas di Sumatra bagian tengah.

Selain tol Pekanbaru—Dumai, Riau juga akan dilalui jalan tol Pekanbaru—Padang (240 km), Pekanbaru—Rengat (175 km), dan Dumai Rantau Prapat (175 km).

Posisi yang strategis itu didukung keberadaan Pelabuhan Dumai yang berhadapan dengan Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan dunia yang paling sibuk.

Keberadaan tol Pekanbaru—Dumai ternyata disambut baik oleh pelaku usaha, termasuk dari segmen usaha kecil di Dumai. Andika, misalnya. Karyawan toko usaha keripik pedas merek Ika ini mengaku banyak pelanggan yang membeli keripik dari luar kota, termasuk Pekanbaru.

"Biasanya kalau ada pesanan dari luar kota, kami akan kirim dengan paket [ekspedisi], banyak juga pelanggan kami dari Pekanbaru. Dengan adanya tol tentu pengiriman kami bisa lebih cepat," ujarnya.

Selama ini jarak tempuh dari daerah itu ke Kota Dumai, bisa menghabiskan waktu 4 jam—5 jam perjalanan melewati jalan nasional dalam keadaan normal. Bila jalan tol sudah dibuka, Andika yakin distribusi ubi kayu akan lancar. Tidak lagi menjadi masalah di kemudian hari.

Sementara itu, pemilik penginapan Taman Homestay di Dumai Sitan Kayo mengaku keberadaan jalan tol nantinya membuat pengunjung dan wisatawan ke kota pelabuhan itu bertambah.

Mereka meyakini jalan tol akan menggerakkan perekonomian daerah lebih cepat karena jarak tempuh antarkota di Riau, khususnya Pekanbaru—Dumai menjadi semakin singkat sehingga peluang terbangunnya sentra ekonomi baru kian terbuka. ■

Kondisi Jalan di Riau 2018

Status atau Kewenangan	Panjang (Km)	Rasio Mantap	Rasio Tidak Mantap
Nasional	1.336,61	85,27%	14,73%
Provinsi	2.799,81	58,44%	41,56%
Kota	2.476,14	66,29%	33,71%
Kabupaten	17.297,66	49,96%	50,04%

Sumber: Kementerian PUPR

Bisnis/Ilham Nasution

Judul	Pembebasan Lahan Jadi Kunci HK Selesaikan JTTS	Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 10)		
Resume	PT Utama Karya (Persero) patut berbangga karena mampu menyelesaikan pembangunan sejumlah ruas Jalan Tol Trans-Sumatra sesuai dengan tenggat yang diberikan pemerintah.		



Pembebasan Lahan Jadi Kunci **HK** Selesaikan JTTS

PT Utama Karya (Persero) patut berbangga karena mampu menyelesaikan pembangunan sejumlah ruas Jalan Tol Trans-Sumatra sesuai dengan tenggat yang diberikan pemerintah.

Menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatra (JTTS) tepat waktu sesuai dengan target yang diberikan pemerintah bukanlah perkara gampang. Pasalnya, Sumatra memiliki karakteristik yang berbeda dengan Jawa dan memiliki sejumlah rintangan, mulai dari kondisi medan hingga penyediaan lahan.

PT Utama Karya (Persero) atau HK telah mengoperasikan lima ruas JTTS hingga November 2019. Panjang jalan tol yang dioperasikan *pun* mencapai 469,5 kilometer, terdiri dari Bakauheni—Terbanggi Besar sepanjang 140,9 km, Terbanggi Besar—Pematang Panggang—Kayu Agung 189 km, Palembang—Indralaya 22 km, dan Medan—Binjai 13 km.

Panjang jalan tol yang beroperasi tersebut akan bertambah sejalan dengan jadwal penyelesaian tol Pekanbaru—Dumai sepanjang 131 km.

Salah satu kunci sukses cepatnya penyelesaian JTTS itu adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan yang berjalan dengan baik setelah melalui banyak tantangan menjadi bukti sinergi dan komitmen para pemangku kepentingan, mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Utama Karya yang ditugaskan menggarap 24 ruas JTTS sepanjang 2.765 km.

Menteri BUMN periode 2015—2019 Rini Soemarno mengatakan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pembebasan lahan untuk proyek JTTS. Pemerintah daerah juga memegang peran kunci dalam penetapan lokasi untuk proyek tol yang tidak dibuat tunggal.

Misalnya saja di jalan tol Bakauheni—Terbanggi Besar, penetapan lokasi dipecah menjadi 20 titik agar secara paralel konstruksi bisa dilakukan. Di samping itu, kepastian regulasi terkait proyek strategis nasional juga membuat ruang gerak dalam pembebasan lahan lebih leluasa. Di Pekanbaru—Dumai, pembebasan lahan memang berlangsung cukup alot karena tumpang tindih bukti kepemilikan lahan. Proses ganti rugi akhirnya bisa berjalan lewat sistem konsinyasi yang mana uang ganti rugi dititipkan ke pengadilan.

Pada kenyataannya, setiap kali proyek pembangunan jalan tol yang memakan lahan warga memang tidak selalu berjalan mulus. Beragam protes dan ketidakpuasan warga selalu mengintai di balik proses pembebasan lahan.

HK juga menghadapi soal serupa. Namun demikian, langkah manajemen yang andal, responsif, efektif, dan efisien mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Sebagai perusahaan pelat merah, HK selalu menjunjung aspirasi warga yang terkena imbas proyek pembangunan dengan selalu patuh dan taat terhadap peraturan yang berlaku.

Sekretaris Perusahaan Utama Karya Muhammad Fauzan mengatakan bahwa perseroan selalu mengedepankan hak warga yang terkena imbas pembangunan proyek. Salah satu yang diprioritaskan adalah kepastian warga mendapatkan ganti untung.

“Hal ini penting agar masyarakat yang memiliki lahan tidak merasa dirugikan dengan kehadiran proyek ini,” katanya.

Selain itu, HK juga secara ajeg mengikuti alur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selagi proses pembebasan lahan yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), HK selalu aktif memantau dan mengawal pelaksanaannya.

“Kami juga siap menjalankan strategi menyipakan dana talangan untuk pembebasan lahan sebagai bentuk komitmen pembangunan proyek,” ujarnya.

Tak hanya itu, proses pembebasan lahan yang digawangi Kementerian PUPR itu diperkuat dengan analisa penaksir atau *appraisal* independen, sehingga dapat menghapus keraguan warga terkait kesewenangan penentuan harga lahan.

Untuk meredam kekhawatiran warga di wilayah yang terkena dampak proyek, HK juga berinisiatif menjalankan nilai transparansi. Perusahaan membuka informasi kepada publik terkait detil proyek, mulai dari perencanaan, rancangan, proses pembebasan lahan, hingga konstruksi. (Adv)

Judul	RUMAH SEDERHANA JAKARTA: Lahan BUMD Bisa Jadi Solusi	Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia (Halaman, 23)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuntaskan program bedah rumah untuk 4.411 rumah tidak layak huni (RLTH) di Provinsi Banten, melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).		

► RUMAH SEDERHANA JAKARTA

Lahan BUMD Bisa Jadi Solusi

Bisnis, JAKARTA — Pemanfaatan lahan badan usaha milik daerah (BUMD) dianggap dapat menjadi solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan harga hunian yang semakin mahal dan terbatasnya ketersediaan lahan di Jakarta.

Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto mengatakan harga hunian yang semakin mahal membuat masyarakat semakin sulit untuk memiliki hunian di Jakarta dan semakin memperparah jumlah defisit hunian atau *backlog* di Jakarta.

Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat *backlog* di Jakarta mencapai 1,2 juta unit. Angka tersebut baru jumlah rumah tangga ber-KTP Jakarta yang tercatat belum memiliki rumah sendiri.

Menurut Wendy, apabila ditambah dengan pendatang atau rumah tangga yang tidak ber-KTP Jakarta tetapi tinggal dan bekerja di Jakarta, maka jumlah *backlog* akan semakin tinggi. Apalagi Jakarta saat ini masih menjadi magnet urbanisasi yang menarik bagi para pendatang.

"Menampung warga Jakarta berarti menyediakan hunian yang layak dan murah. Pembangunan hunian vertikal menjadi opsi yang wajib dipertimbangkan untuk menyediakan rumah bagi warganya," kata Wendy kepada *Bisnis*, Senin (2/12).

Dia mengungkapkan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan mahalannya harga lahan di Jakarta adalah dengan mendorong kerja sama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan sektor swasta.

"Pemanfaatan lahan milik BUMD seperti pasar misalnya, dapat meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan lahan di pusat Kota," ujarnya.

Wendy mengatakan ide pemanfaatan lahan milik BUMD

sudah terwujud di kawasan Pasar Rumput di Jakarta Selatan. Lahan yang dimiliki PD Pasar Jaya itu sebelumnya hanya berfungsi sebagai pasar, tetapi kini ditambah dengan hunian vertikal di atas bangunannya.

Selain itu, kawasan tersebut juga menawarkan kemudahan akses transportasi, karena terkoneksi dengan halte TransJakarta Pasar Rumput dan berdekatan dengan Stasiun Manggarai.

Menurutnya, konsep tersebut juga bakal dikembangkan pada lahan lainnya milik PD Pasar Jaya yaitu Pasar Senen. Dia mengungkapkan kehadiran hunian vertikal di atas pasar dapat semakin menggairahkan roda perekonomian di pasar tersebut.

"Tidak hanya di pasar, ke depannya bukan tidak mungkin kalau rusun murah juga dibangun di atas lahan-lahan BUMD lainnya seperti terminal," ucapnya.

BEDAH RUMAH

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menuntaskan program bedah rumah untuk 4.411 rumah tidak layak huni (RLTH) di Provinsi Banten, melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan PUPR tahun ini sudah menyelesaikan penyaluran program BSPS sebanyak 4.411 unit rumah di Banten," ujar Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Banten Tatang Supiatna, dikutip melalui siaran pers, Senin (2/12).

Tatang menjelaskan, penyaluran BSPS di Banten tersebar di enam kabupaten/kota, di antaranya Kabupaten Pandeglang sebanyak 2.174 unit, Kota Serang 129 unit, Kabupaten Serang 950 unit, Kabupaten Tangerang 922 unit, Kota Tangerang Selatan 106 unit, dan Kabupaten Lebak 130 unit.

(Fitri Sartina Dewi)

Judul	Kementan-PU Pera Kolaborasi Infrastruktur	Tanggal	Rabu, 4 Desember 2019
Media	Media Indonesia (Halaman, 13)		
Resume	Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sepakat melaksanakan sinergi pengembangan infrastruktur pertanian.		

Kementan-PU Pera Kolaborasi Infrastruktur

MENTERI Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono sepakat melaksanakan sinergi pengembangan infrastruktur pertanian.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan Kementerian PU-Pera yang dilaksanakan di Kantor Kementerian PU-Pera, Jakarta, kemarin.

"Pertemuan ini adalah bukti dan komitmen Kementerian PU-Pera dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," kata Basuki.

Adapun ruang lingkup pengem-

bangun yang akan dilakukan meliputi sistem irigasi dan lahan pertanian, terutama untuk komoditas padi. Kerja sama juga diterapkan dalam hal operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana.

"Kami juga akan melakukan kerja sama pertukaran data dan informasi hasil penelitian, pengembangan, serta pemanfaatan produk pertanian sebagai bahan baku konstruksi, seperti penggunaan karet alam sebagai campuran aspal," ujar Basuki.

Kementan dan Kementerian PU-Pera, menurut Basuki, harus direkatkan dan seiring sejalan. Pasalnya, sebagian besar urusan

pertanian berkaitan dengan air yang perlu ditunjang dengan infrastruktur yang optimal.

Dalam kesempatan itu, Syahrul menyampaikan bahwa kerja sama itu menjadi kunci dalam menyelesaikan tugas-tugas besar.

Dia berkomitmen untuk bersinergi dan melakukan diplomasi dengan seluruh mitra kerja yang punya peran penting dalam sektor pertanian, termasuk tata kelola air. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi modern pada pertanian sudah menjadi keharusan.

"Kerja sama ini adalah salah satu bentuk konsolidasi teknokratik. Tidak mungkin Kementan bekerja

sendiri untuk memenuhi pangan 267 jiwa rakyat Indonesia. Kerja sama ini jangan dibatasi hal-hal teknis. Kita mulai inisiasi ke ranah sistem, manajemen, dan rekayasa teknologi," kata Syahrul.

Ia optimistis kolaborasi dengan Kementerian PU-Pera bisa mendorong produktivitas hasil pertanian di dalam negeri sehingga target peningkatan ekspor produk agrikultur bisa segera tercapai.

"Kami akan fokus meningkatkan produksi pangan di tujuh sampai sepuluh provinsi. Provinsi-provinsi di luar itu kita arahkan sebagai penyangga," tandas Syahrul. (Pra/E-2)